



Gambaran Umum Perangkat Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

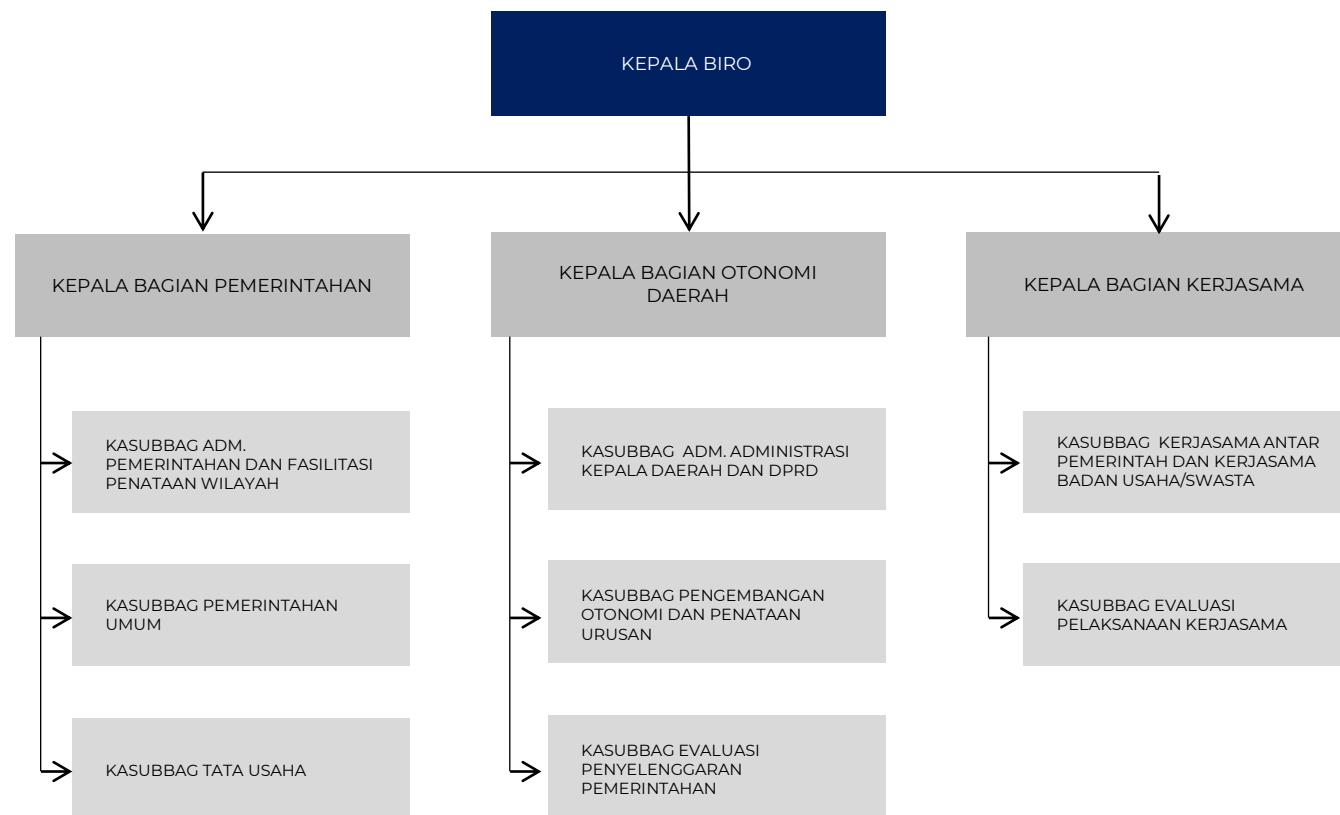
- a) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



Struktur Organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

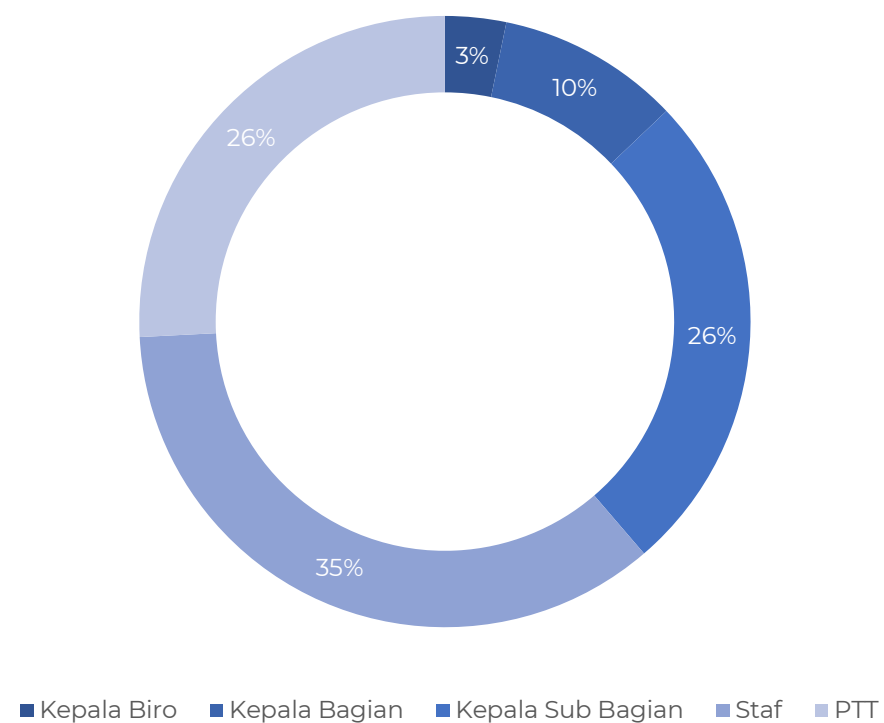


Personil / Pegawai.

Rekapitulasi Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin:

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Biro	1	0	1
2	Kepala Bagian	3	0	3
3	Kepala Sub Bagian	7	1	8
4	Staf	9	2	11
5	PTT	4	4	8
	Jumlah	24	7	31

Jumlah Pegawai

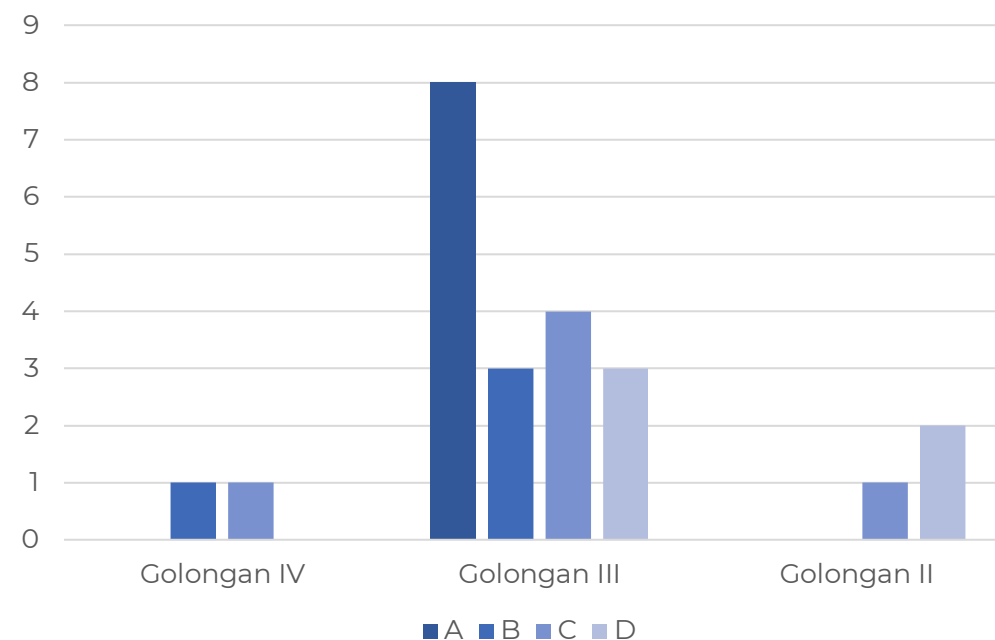


Personil / Pegawai.

Rekapitulasi PNS Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan:

No.	Jabatan	Golongan														
		IV					III					II				
		A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ
1	Kepala Biro			1		1										
2	Kepala Bagian		1			1				2	2					
3	Kepala Sub Bagian							3	4	1	8					
4	Pelaksana						8				8			1	2	3
	Jumlah					2					18					3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan





Perencanaan Kinerja.

Perencanaan Kinerja mengacu kepada tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah , yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki Tujuan dan Sasaran untuk mendukung terwujudnya Misi Ke -2 dan Ke -14 Gubernur Kalimantan Utara, yang diantaranya adalah :



01

Misi Ke-2

Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.

02

Misi Ke-14

Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Ren. Kinerja

**01**

Meningkatkan Tata Kelola pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah di perangkat daerah.

02

Meningkatkan Percepatan Calon DOB menjadi DOB.

Tujuan**01**

Meningkatnya sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

02

Mempercepatnya pemenuhan persyaratan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sasaran Strategis**01**

Persentase kualitas dan validitas data IKK LPPD di atas > 85 % dari 41 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

02

Persentase persyaratan Administratif dan Dasar Calon DOB.

Indikator**100%****20%****Target****1****2****3****4**



Sumber Daya Alokasi Anggaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2022 menerima dukungan dana anggaran yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang masing-masing sebesar :

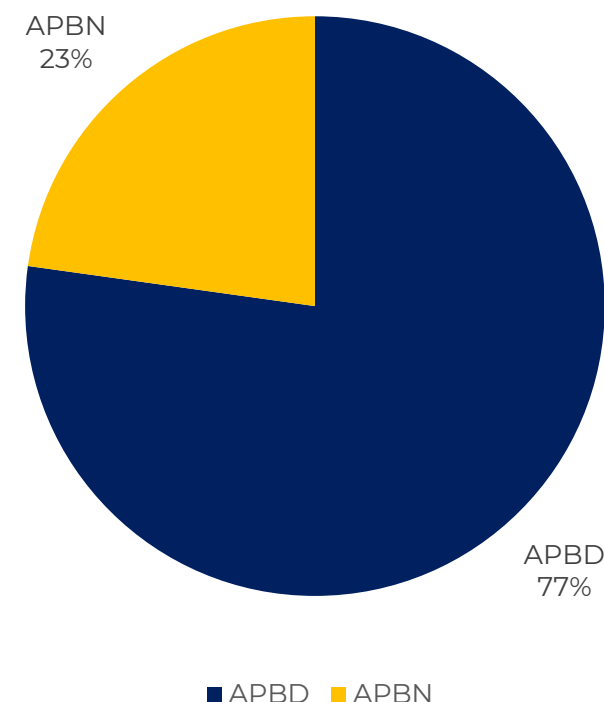
01

Pada tahun 2022, Biro Pemerintahan memiliki sebanyak 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 1.950.070.929,00 (*Satu Miliar Sembilan ratus Lima puluh Juta Tujuh puluh Ribu Sembilan ratus Dua puluh Sembilan Rupiah*);

02

Selain alokasi anggaran yang berasal dari APBD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga menerima alokasi anggaran APBN melalui dana dekonsentrasi penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan rincian program/kegiatan sebanyak 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 5 (lima) Komponen, 14 (empat belas) Sub Komponen, dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 575.592.000,00 (*Lima ratus Tujuh puluh Lima juta Lima ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah*)

Anggaran Biro Pemerintahan dan Otda Tahun 2022





Program Dan Kegiatan.

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yang terdiri atas Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Kerjasama, yang mana ketiga bagian ini bekerja saling sinergi dan menunjang satu dan lainnya. Rincian Rencana Kerja tahun 2022 pada masing – masing bagian, dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mendukung pada penyelenggaraan program, sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi Penataan Wilayah



Lanjutan Program Dan Kegiatan.

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yang terdiri atas Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Kerjasama, yang mana ketiga bagian ini bekerja saling sinergi dan menunjang satu dan lainnya. Rincian Rencana Kerja tahun 2022 pada masing – masing bagian, dijelaskan sebagai berikut:



Bagian Otonomi Daerah

Bagian Otonomi Daerah, mendukung pada penyelenggaraan program, sebagai berikut :

- a. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama, mendukung pada penyelenggaraan program, sebagai berikut :

- a. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta